

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Organisasi merupakan wadah bagi sekelompok orang yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama (Jones, 2013). Dalam suatu organisasi terdapat tugas – tugas yang di koordinasikan sehingga dapat mewujudkan tujuan dari organisasi yang telah dibentuk. Keberhasilan sebuah organisasi atau instansi pemerintah ditentukan oleh sejauh mana tujuan yang telah direncanakan dapat dicapai. Tujuan instansi pemerintah dapat dicapai apabila mampu mengolah, mengontrol, menggerakkan dan menggunakan sumber daya manusia yang dimiliki secara efektif dan efisien.

Kinerja karyawan merupakan hasil olah pikir dan tenaga dari seorang karyawan terhadap pekerjaan yang dilakukannya, dapat berwujud, dapat dilihat, dihitung jumlahnya, akan tetapi dalam banyak hal hasil olah pikir dan tenaga tidak dapat dihitung dan dilihat, seperti ide – ide bagaimana pemecah suatu persoalan, inovasi baru suatu produk barang atau jasa, bisa juga merupakan penemuan atas prosedur kerja yang lebih efisien. Kinerja merupakan bagian yang sangat penting dan menarik karena terbukti sangat penting manfaatnya, suatu lembaga menginginkan karyawan untuk bekerja sungguh – sungguh sesuai dengan kemampuan yang dimiliki untuk mencapai hasil kerja yang baik, tanpa adanya kinerja yang baik dari seluruh karyawan, maka keberhasilan dalam mencapai tujuan akan sulit tercapai.

Penilaian kinerja adalah suatu system melalui mana organisasi mengevaluasi atau menilai kinerja karyawan yang sesuai dengan kinerja mereka masing – masing kepada perusahaan (Handoko, 2006). Sistem ini bertujuan untuk memotivasi para karyawan atau pegawai agar bisa meningkatkan kinerja. Oleh karena itu kinerja yang baik tidak hanya individu saja yang menguntungkan, akan tetapi lembaga institusi atau organisasi maupun masyarakat juga akan mendapatkan keuntungan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi dalam organisasi atau lembaga institusi sangat dibutuhkan. Salah satunya adalah penelitian yang menyangkut kinerja karyawan atau pegawai yang diyakini merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam organisasi.

Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, penting sekali untuk diperhatikan karena merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (karyawan atau pegawai). Anoraga (2007:187) menjelaskan faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja adalah motivasi, pelatihan dan pendidikan, kompensasi, teknologi, ketrampilan dan disiplin kerja. Salah satu instrumen dalam pengembangan dan kualitas sumber daya manusia para pegawai adalah melalui pendidikan, pelatihan, dan kursus – kursus yang masih menjadi tantangan dan kendala untuk merubah kinerja karyawan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh Indonesia. Lingkup pengawasan Bawaslu yakni terkait kepatuhan KPU sebagai penyelenggara pemilu dan pilkada. Dalam perjalanannya Badan Pengawas Pemilihan Umum atau yang biasa disebut Bawaslu mengalami peningkatan secara bertahap, pertama melalui UU No. 12 Tahun 2003, pembentukan lembaga ad hoc yang terlepas dari struktur kelembagaan KPU yang melaksanakan pengawasan pemilu. Kedua melalui UU No. 22 Tahun 2007, dalam Undang – Undang Pengawas Pemilu ditingkat pusat dipermanenkan

menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Ketiga, melalui UU No. 15 Tahun 2011 dalam Undang - Undang kelembagaan Bawaslu menjadi Panitia Pengawas Pemilu ditingkat Provinsi Bawaslu Provinsi. Keempat, melalui UU No. 7 Tahun 2017, Undang – Undang memberikan kewenangan yang besar dan signifikan. Secara kelembagaan, Panitia Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dipermanenkan menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu diberi kewenangan yang cukup yakni sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, menilai dan memutus pelanggaran administrasi melalui proses sidang pengadilan. Bawaslu bukan hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi juga lembaga peradilan dalam penegakan hukum penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu.

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu bahwa Bawaslu mempunyai tugas yaitu :

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap pelanggaran dan sengketa proses pemilu.
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota.
- d. Mengawasi netralisasi semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Pemilu.
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri dari putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu, putusan/keputusan Bawaslu, Bawasku Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

serta keputusan pejabat berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017.

- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
- h. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.

Tabel I.1 Susunan divisi anggota Bawaslu

No	Jabatan	Golongan	Jumlah
1.	Ketua Bawaslu Banyumas, sekaligus Koordiv. Penyelesaian Sengketa		1
2.	Koordiv. Penanganan Pelanggaran		1
3.	Koordiv. Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga		1
4.	Koordiv. Hukum, Humas, Data dan Informasi		1
5.	Koordiv. Sumber Daya Manusia dan Organisasi		1
6.	Koordinator Sekretariat		1
7.	Bendahara Pembantu Keuangan		1
8.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran		1
9.	Staf Divisi Pengawas dan Hubungan Antar Lembaga		1
10.	Staf Divisi Penyelesaian Sengketa		2
11.	Staf Divisi Keuangan		1
12.	Staf Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi		1
13.	Staf Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi		1
14.	Staf Bagian Agendaris		1
15.	Tenaga Pendukung Keamanan		2
16.	Tenaga Pendukung – Tenaga Kebersihan		2
	Jumlah		19

Sumber: Data Bawaslu Banyumas 2020

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terdapat di setiap daerah, salah satunya adalah di Kabupaten Banyumas. Bawaslu Banyumas beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 38, Karanganjing Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, Jawa Tengah 53127.

Berdasarkan macam kegiatan yang harus dilakukan oleh pengawas di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum tersebut dibutuhkan suatu upaya agar setiap kegiatan berjalan lancar. Hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut akan menunjukkan tingkat kinerja pegawai. Untuk menciptakan kinerja pegawai yang tinggi tentu dibutuhkan berbagai faktor pendukung.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa perlu adanya evaluasi kinerja pegawai dalam proses meningkatkan kinerja instansi pemerintah itu sendiri. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis hasil penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwas hasil dari penelitian ini untuk memberi masukan pegawai bawaslu agar dapat bekerja lebih baik. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Kinerja Pegawai Di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Banyumas”** .

B. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dapat dibatasi oleh hal – hal sebagai berikut :

1. Dimensi Lokasi

Penelitian dilakukan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

2. Dimensi Waktu

Penelitian dilakukan berdasarkan tahun 2022

3. Dimensi Studi

Kinerja Pengawas Pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu : “Bagaimana Kinerja Pegawai Di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Banyumas?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kinerja pegawai pada kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan di bidang sosial melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara dan untuk dapat mengembangkan pengetahuan dan wawasan dalam meningkatkan kemampuan berfikir penulis.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Bawaslu dalam upaya meningkatkan Kinerja Pengawas Pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.